

MENEKAN KETIMPANGAN PENDANAAN PENDIDIKAN DAN MENGURANGI KEMISKINAN

Aprilliantoni

Dosen Pascasarjana Universitas Islam '45

Email: *aprilliantonilucky@gmail.com*

Abstrak

Kebijakan Inklusi Pendanaan pendidikan akan mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena setiap pertumbuhan ekonomi akan menciptakan tambahan pekerjaan. Merujuk Konsep hukum Coulomb, di mana ada daya tarik yang kuat, bila berbeda muatan akan mengalami tarik menarik, di sini antara pengentasan kemiskinan dan jumlah rata-rata tahun pendidikan, yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak.

Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat dengan cepat, pada awal 1960-an yang hanya 60 Dolar AS per tahun, pada 2016 menjadi 3.605 dollar AS. Sayangnya kenaikan pendapatan rata-rata ini tidak diikuti oleh mengecilnya gap jurang kaya dan miskin, hal ini dibuktikan dengan memburuknya rasio Gini, BPS mencatat koefisien Gini meningkat dengan cepat dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi 0,41 pada tahun 2013 dan menurun sedikit 0,394 pada 2016.

Fokus pemerintah bahwa sejak tahun 2008 mendorong anggaran pendidikan 20 % dari APBN, Dalam jangka pendek sedikit mengurangi kemiskinan, sebaliknya mendorong kuat ekonomi kelas menengah ke atas, Implikasinya mendorong pelebaran ketidaksetaraan ekonomi. Karena itu, pemerintah sekarang perlu untuk mendorong Inklusi pendanaan pendidikan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah rata-rata tahun pendidikan.

Kata Kunci : *Inklusi Pendanaan pendidikan, Gaya Tarik Menarik, Pengentasan kemiskinan*

Pendahuluan

Sebenarnya pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan saat ini banyak dipengaruhi kondisi Global, bagaimana kedudukan pendidikan dalam konteks globalisasi, yang mana saat ini setiap individu semakin terhubung satu sama lain di dunia ini. Selanjutnya bagaimana mendeskripsikan Globalisasi?¹ “...In a increasingly globalized world...there is an exacerbation of civilizational, societal and ethnic self-consciousness...”(Samuel Huntington, 1996²); “...Globalization is another name for American domination...” (H. Kissinger, 1998³); ...It has created tradewar...” (Krugman, 2001); “...The way globalization has been managed...need to be radically rethought...Making globalization work...the next steps to global justice...” (Stiglitz, 2007) Globalisasi dalam arti positif, berarti semakin terintegrasinya aliran barang, jasa, pengetahuan dan modal antar negara. Semua pihak tampaknya memperoleh manfaat dari globalisasi ini. Tatanan ini mendorong peningkatan aliran dana yang belum ada contohnya dari negara maju ke dunia berkembang (enam kali lipat). Peningkatan perdagangan yang belum terkirakan (kenaikan 90 % dalam satu dekade) dan pertumbuhan ekonomi yang tidak disangka pula. Pengetahuan dan teknologi mengalir antar negara menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan. Dalam arti negatif maka krisis di suatu negara dapat menular ke negara lain dalam waktu yang singkat. Sejarah Global menunjukkan krisis dimulai dari Meksiko awal 1990-an, kemudian krisis Asia Timur,⁴ lalu krisis Rusia⁵ dan lantas krisis Amerika Latin.⁶

Globalisasi tampaknya sudah menjadi kenyataan hidup dan tidak akan dapat begitu saja diabaikan, jika tidak ingin menutup pintu bagi hubungan Internasional dan berlanjutnya hubungan itu. Disamping itu, Globalisasi jika

¹Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Revised and Extended Edition, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM edisibaru(2010), 43-49.

²Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order* (New York: Simon Schueter, 1996), p 68, Sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, Mewaspadaai Globalisasi dan PasarBebas*, 50.

³ Henry Kissinger, Trinity College, 1998, Sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*,48.

⁴Krisis Asia disebabkan oleh *Deficit Current Account* yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada saat itu salah satunya didukung oleh kegiatan ekspor-impor negara Asia Tenggara. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya krisis Asia adalah tingkat ketergantungan yang tinggi negara-negara Asia Tenggara terhadap dana asing.

⁵Taimur Baig dan Ilan Goldfajn, “The Russian Default and the Contagion to Brazil,” IMF *Working Paper* WP /00/160, (2000): 4-11.

⁶Krisis Meksiko merupakan krisis nilai tukar *Peso* Meksiko, munculnya program *Pacto* (diakhir 1987) yang bertujuan untuk mengendalikan harga, nilai tukar dan ppeningkatan tingkat upah malah menjadi boomerang untuk Meksiko.Meskipun dipuji karena dianggap sebagai *Miracle Mexico* karena mampu menjaga *fiscal balance* (hingga tahun 1992) serta diikuti dengan penjagaan tingkat inflasi yang selalu dibawah 1 digit, namun di sisi lain program tersebut tidak didukungdengankebijakanmakroekonomi yang konsisten. Kemudiankrisis di Rusia& Latin karenaperekonomianRusiadan Brazil (Latin) mulaitidak stabil sejak tahun 1995 dikarenakan dianutnya *Exchange Rate Bond* (nilai tukar dalam selang tertentu), guncanganpolitik, *Fiscal Imbalance* (*Fiscal Deficit* mencapai 7-8.5% dari GDP pada 1996-1997) dan ditambah situasi eksternal yang buruk. (akibat harga komoditas utama Rusia yang anjlok dan krisis Asia yang mengakibatkan investor melarikan modalnya dari negara berkembang) lihatSebastian Edward, “The Mexican Peso Crisis, How Much Did We Know? When Did We Know It?”*Working Paper* no 6334 NationalBerauf Economic Research, (1997): 1-5.

dikelola dengan baik, bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya, jadi menghadapinya bisa dengan menyiasatinya bukan menolaknya.

Globalisasi bermakna bebasnya pergerakan barang, jasa, pengetahuan, teknologi dan modal tanpa ada batas-batas negara. Globalisasi telah membuat setiap orang di dunia lebih tergantung satu sama lain (*interdependensi*).⁷ Konon bila AS batuk, Meksiko pun tertular, Kini saat AS bersin, sebagian besar negara dunia tertular flu.

Dala Konteks kebijakan pendidikan menurut Cornoy (1982) merupakan bagian dari kebijakan negara (*state policy*) sebagai produk dari negara, kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh suatu kepentingan politik tertentu, oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari kekuatan politik yang ada. Merujuk sejarah pembangunan pendidikan di Indonesia, sektor pendidikan selalu kurang mendapat prioritas pembangunan. Menurut Mas'ood (1997) pada masa orde lama prioritas pembangunan terletak pada sektor politik, pada masa orde baru prioritas pembangunan terfokus pada sektor ekonomi. Oleh karenanya sektor pendidikan yang didalamnya menyangkut pendanaan pendidikan masih belum mendapat perhatian yang memadai dalam pembangunan.

Setidaknya sejak tahun 2008 anggaran pendidikan menjadi 20 persen, walau sebetulnya yang jatuh untuk operasional pendidikan tidak sebesar itu. Sebagai gambaran, dari anggaran pendidikan tahun 2012 sekitar Rp 289 triliun yang dikelola Kemendikbud RI, untuk operasional hanya Rp 64 triliun. Ke mana sisanya? selebihnya dipergunakan untuk membiayai pendidikan yang diurus kementerian atau lembaga lain, misalnya, Kementerian Agama, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), dan Sekolah Tinggi Statistik.

Kenapa demikian? Hal itu sekurangnya bisa dilacak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007. Saat itu MK menilai masalah anggaran pendidikan yang dinyatakan Pasal 49 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlawanan dengan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang tidak memuat gaji pendidik dalam anggaran pendidikan. Dengan demikian, MK berpendapat gaji pendidikan mesti dimasukkan menjadi komponen anggaran pendidikan agar pencapaian 20 persen bisa dicapai pemerintah. Putusan itu dibacakan pada tanggal 2 Februari 2008 atas gugatan pengujian materi yang diajukan Rahmatiah Abbas, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sebelumnya, gugatan juga datang dari para guru menyangkut kasus serupa. Putusan MK seolah membela amandemen keempat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) yang menyatakan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Padahal, sebenarnya putusan itu membelenggu. Ketika komponen gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan dibebankan ke dalam 20 persen itu,

⁷Dalam *Globalization and Its Discontents*, Stiglitz menceritakan secara panjang lebar pangkal ketidakpuasan terhadap Globalisasi sebagaimana adanya sekarang, dan bagaimana aturan serta lembaga-lembaga yang menata globalisasi bisa diperbaiki agar janji-janji globalisasi bisa dipenuhi. Stiglitz berpendapat bahwa dengan perbaikan tersebut, globalisasi bisa meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan negara-negara yang kurang maju. Dan tanpa perbaikan tersebut, kemiskinan akan meningkat, pertumbuhan terhambat dan demokrasi dirongrong.

anggaran pendidikan yang ditujukan untuk operasi pendidikan yang ditangani Kemdikbud menjadi sangat kecil. Sebab, lebih dari 70 persen mesti didistribusikan ke daerah-daerah dalam rangka pembayaran gaji beserta tunjangan profesi guru dan juga untuk membayar pendidikan kedinasan—yang dikelola kementerian atau lembaga lain. Persentase 20 persen juga dipakai untuk banyak hal, mulai dari membayar gaji guru, membangun sekolah, atau infrastruktur pendidikan. Sehingga 20 persen itu untuk membiayai pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.

Metodologi

Studi paper ini merupakan hal baru, terutama topik tentang tinjauan Kebijakan Inklusi Pendanaan pendidikan yang punya relasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan terjadinya gaya tarik menarik antara dua kutub tersebut. Penelitian terdahulu hanya membandingkan tingkat penambahan tahun pendidikan dengan kemiskinan tingkat lintas negara.

Penelitian ini mengeksplorasi data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku literatur relevan, melakukan pencarian jurnal-jurnal internasional Internasional terbaru untuk mendukung penelitian ini khususnya yang menyangkut Pendanaan Pendidikan.

Inklusi Pendanaan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Semua manusia tanpa kecuali membutuhkan pendidikan, bahkan lebih dari itu beberapa pihak sangat berkepentingan terhadap pendidikan. Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa salah satu tujuan mendirikan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka adalah: *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa* “Demikian pula amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 45 pasal 31 :” *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”.

Alasan yang sering digunakan untuk memajukan Pendidikan adalah adanya dampak terhadap Pendapatan perkapita (*GDP percapita*), meningkatkan pendapatan individu dan mengurangi kemiskinan. Hubungan ini telah dianalisa secara cermat selama beberapa dekade, walau sekarang masih ada sedikit keraguan tentang hubungan kausal peran pendidikan. Studi literatur menunjukkan 3 cara utama memprediksi tingkat pengembalian ekonomi (*economic return*) akan peran pendidikan :

1. Estimasi model regresi lintas negara, yang menilai hubungan antara peningkatan rata-rata tingkat pendidikan dengan Pendapatan Ekonomi Nasional (*pertumbuhan GDP percapita*)
2. Manfaat tingkat, untuk membandingkan dan mengukur *income* yang diperoleh dihubungkan dengan jumlah tahun pendidikan
3. Relasi tahun pendidikan rata rata dengan kemiskinan

Fakta bahwa relasi Pendidikan dengan pendapatan nasional membuktikan bahwa pendidikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan hal ini telah dipelajari secara intensif dan diterima secara baik semua kalangan, Dimulai penelitian Schultz pada tahun 1961, Becker pada tahun 1964, Banyak Ekonom yang memperelajari peran pendidikan dalam kenaikan pendapatan, Romer (1994) Mingat dan Tan (1996), Heckman dan Klenow (1997), Topel (1999)Bils dan Klenow (2000),

Relasi Pendidikan dan pendapatan ekonomi nasional sebagai bukti bahwa pendidikan adalah pendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah dipelajari secara ekstensif dan diterima dengan baik. dimulai dengan Schultz pada tahun 1961 dan Becker Pada tahun 1964, kemudian banyak ekonom telah mempelajari peran pendidikan dalam kenaikan pendapatan, termasuk Romer (1994), Mingat dan Tan (1996), Heckman dan Klenow (1997), Topel (1999), Bils dan Klenow (2000), Bassanini dan scarpetta (2001), Krueger dan Lindahl (2001), Sianesi dan Vanareenen (2003), Psacharopoulos dan Patrinos (2004), Brossard dan Foko (2006), de la Fuente dan doménech (2006), Cohen dan Soto (2007), Hanushek dan Woessmann (2008), Barro dan Lee (2010) dan Patrinos dan Psacharopoulos (2013). Secara garis besar , penelitian tersebut membuktikan bahwa tambahan tahun belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDP per kapita atau pertumbuhannya.

Menyediakan lebih banyak pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan untuk warga negara oleh suatu negara, yakni dengan menambah *Human Capital*, meningkatkan produktivitas, dan kemampuan kerja, pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Crespo Cuaresma, Lutz dan sanderson (2012) menghitung bahwa setiap tahun tambahan belajar atau Pendidikan dikaitkan dengan peningkatan 18 % GDP per kapita; ini adalah angka rata – rata, dengan menggunakan perkiraan ini, negara seperti Guinea, yang rata-ratanya 3,3 tahun pendidikan per orang pada tahun 2012,bandingkan dengan negara seperti Kenya, dimana rata-ratanya 9,0 tahun, sehingga GdP per kapita bisa berlipat ganda.

Selain itu, Patrinos dan Psacharopoulos (2013)⁸ dan Lomborg (2013) menunjukkan bahwa ada korelasi antara meningkatkan tingkat pendidikan di suatu negara, yang diukur dengan rata - rata tahun pendidikan, dan penurunan ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Koefisien Gini.⁹ menggunakan data untuk 114 negara, Untuk Indonesia Periode 1985-2005, menunjukkan tambahan satu tahun pendidikan dikaitkan dengan pengurangan Koefisien Gini sebesar 1,4 poin persen.

Tabel 1. Statistik Kemiskinan Dan Ketidaksetaraan Di Indonesia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemisikinan relatif (% dari populasi)	16,6	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,5	11,0	11,1	10,9
Koefisien Gini	0,35	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

⁸ Patrinos, Harry Anthony, and George Psacharopoulos. 2013. 'Education: The income and equity loss of not having a faster rate of human capital accumulation'. In *How Much Have Global Problems Cost the World? A scorecard from 1900 to 2050*, edited by Bjørn Lomborg. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

⁹ Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, *Variabilità e mutabilità*. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0.25 (Denmark) hingga 0.70 (Namibia).

Penelitian juga menunjukkan orang dewasa dengan tingkat pendidikan rata-rata tinggi, pendapatannya akan lebih tinggi. Secara global, rata-rata tingkat pengembalian pribadi untuk satu tahun tambahan pendidikan ditemukan kenaikan pendapatan 10 persen, menurut perhitungan lebih dari 800 survei di 139 negara. Tingkat return pada umumnya lebih rendah pada negara berpenghasilan menengah daripada negara yang berpenghasilan negara tinggi.

Yang menarik juga bahwa bahwa return lebih tinggi diperoleh pada wanita daripada pada pria. selama bertahun-tahun, tingkat return pribadi pendidikan telah sedikit menurun, Hal ini menunjukkan bahwa dunia menuntut keterampilan lebih, keahlian yang meningkat seiring dengan meningkatnya kompetisi (Montenegro dan Patrinos 2014). Oleh karenanya ada harapan yang tinggi dengan argumen yang kuat untuk investasi di bidang pendidikan, terutama di negara berkembang.

Oleh karenanya akses pendidikan kini tak harus eksklusif lagi, Akhir-akhir ini istilah inklusif santer terdengar, baik disampaikan oleh pemerintah, swasta, dosen maupun mahasiswa. Pendidikan *Inklusif* ini setidaknya bisa dimaknai sebagai akses pendidikan bagi semua orang, bukan lagi segelintir orang. Yakni pendidikan yang hanya untuk orang-orang kaya dan mampu, bukan untuk si miskin, pendidikan bermutu hanya diperoleh di kota-kota besar dan sulit untuk daerah pelosok. Salah alat ukurnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)¹⁰. Keleluasaan akses ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil. "... Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu .." (al Hasyr ayat 7).

Ada beberapa cara bisa dilakukan untuk mempercepat indeks ini, misalnya Bank Nirkantor, Bagi bank sendiri, keberadaan bank ini bisa menekan biaya karena tak harus membangun kantor secara fisik diseluruh tanah air, sehingga bisa menjangkau sampai pelosok tanah air, dari Sabang sampai pelosok Papua. Selanjutnya mendorong agen bank, hingga masyarakat tak harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses layanan pendanaan pendidikan. Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memberi standar layanan yang sama dalam pendanaan terhadap sekolah favorit maupun sekolah non unggulan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Meningkatkan anggaran 20 % APBN dan APBD benar-benar murni untuk meningkatkan kualitas human capital, sebaliknya mengurangi pos-pos yang tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Bahkan Diera digital ini, Inklusi pendidikan semakin dibutuhkan, pasar sangat memerlukan kemudahan dan kecepatan. Kini telah hadir lembaga keuangan baru yang benar benar *Branchless*, namanya *Tekfin* atau Teknologi Finansial, tidak mementingkan agunan atau kolateral, cukup membantu nasabah yang tidak punya aset untuk menjadi agunan dalam pengajuan pinjaman, usaha yang dimiliki nasabah dan kelangsungan usaha yang menjadi pertimbangan utama. Tidak tanggung- tanggung dalam 2 tahun *Tekfin* telah mengelola dana 156 triliun (2015) menjadi 234 triliun pada 2016. Saat ini sudah ada 600 usaha *Tekfin*, 157 diantaranya sudah mendaftar ke OJK, Sistem ini sebenarnya lebih mirip sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam, yakni adanya gotong royong

¹⁰ Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah

dan Takaful, lembaga *Tekfin* ikut mendidik para investor yang saat ini berjumlah 6000 orang, dengan ikut melihat profil risiko nasabah sebelum memutuskan ikut membiayai.

Laman pinjam meminjam memungkinkan seseorang berinvestasi dalam bentuk meminjamkan uang kepada peminjam yang terdaftar di platform. Disini perusahaan *Tekfin* hanya berfungsi menyalurkan dana dari pemilik modal kepada peminjam. Seluruh proses investasi ataupun pengajuan kredit dilakukan secara Daring, pinjem uang bagaikan pesan Gojek.

Dengan kecepatan akses yang dimiliki *Tekfin*, maka sekolah-sekolah miskin atau sekolah terpencil bisa mendapat bantuan pendanaan pendidikan dengan cepat dan proses yang sederhana. Kalau di Indonesia bisa jadi inspirasi itu belajar dari kisah sukses bank yang banyak meraih laba pada 2014 adalah bank BRI yang mengungguli Bank Mandiri, BCA dan BNI. Kesuksesan BRI ini karena bisnisnya membuka akses layanan perbankan pada semua pihak, fokusnya pada kredit mikro, kecil dan menengah, sehingga mulai diikuti banyak bank lain dan BRI yang mempunyai Jaringan Satelit sendiri bisa menjadi contoh, layanannya menjangkau seluruh pelosok Indonesia, bahkan daerah terpencil di Papua.

Gaya Tarik Menarik

Pada dasarnya jumlah tahun pendidikan sangat berbeda dengan pengentasan kemiskinan (*pro poor*), tetapi justru karena beda, oleh karenanya terjadi gaya tarik yang kuat, jaraknya lebih kecil maka gaya tarik lebih besar. Membuka dan menambah jumlah tahun pendidikan berarti membuat seseorang menjadi produktif dan punya daya saing, sehingga bisa meningkatkan pendapatannya pelaku lebih produktif dan memberikan kontribusi nilai tambah (nilai tambah ekonomi) mereka kepada GDP. Sehingga program pro Pendidikan semakin besar, semakin besar daya tariknya terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini bisa dijelaskan oleh Hukum Coulomb, tentang daya tarik atau penolakan. Dua benda yang memiliki muatan serupa akan saling tolak satu sama lain saat mendekati satu sama lain. Kedua benda dengan muatan berbeda (tidak sejenis) akan saling tarik menarik saat dibawa mendekat satu sama lain. Tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik adalah sebuah bentuk kekuatan yang dikenal sebagai gaya coulomb. Kekuatan coulomb adalah kekuatan yang timbul antara benda bermuatan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu proporsi muatan masing-masing badan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara objek bermuatan.

Gaya Coulomb adalah gaya yang terjadi karena adanya interaksi dua buah atau lebih muatan. Muatan yang sejenis akan tolak menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik menarik. Gaya Coulomb pertama kali didefinisikan oleh fisikawan Perancis yang bernama Charles Coulomb pada tahun 1785. Bunyi hukum Colomb adalah “Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan.”

Hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut :

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

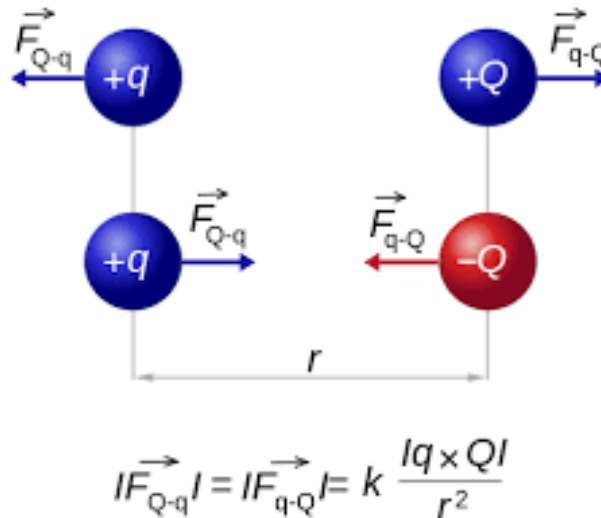
Keterangan :

F = gaya Coulomb (N)

q_1, q_2 = muatan (coulomb = C)

r = jarak antar muatan (m)

k = konstanta ($9 \times 10^9 Nm^2C^{-2}$)



Disini diasumsikan q_1 adalah penambahan tahun pendidikan (*pro education*), sedangkan q_2 adalah pengentasan kemiskinan (*pro poor*), karena berbeda muatan antara penambahan tahun pendidikan dan pengentasan kemiskinan, maka jaraknya makin dekat, maka semakin besar gaya tarik menariknya, disini sebagai berbanding terbalik kuadrat kuadrat jarak.

Dengan konsep teori ini bisa diterangkan bahwa akan dihasilkan pengentasan kemiskinan dengan penambahan tahun pendidikan

Kesimpulan

Globalisasi Pendidikan tampaknya sudah menjadi kenyataan hidup dan tidak akan dapat begitu saja diabaikan, jika tidak ingin menutup pintu bagi hubungan Internasional dan berlanjutnya hubungan itu. Disamping itu, Globalisasi pendidikan jika dikelola dengan baik, bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya, jadi menghadapinya bisa dengan menyiasatinya bukan menolaknya. Globalisasi telah membuat setiap orang didunia lebih tergantung satu sama lain (*interdependensi*), Globalisasi menuntut kompetisi Human capital yang tinggi, dunia menuntut keterampilan lebih, menuntut jumlah tahun pendidikan, keahlian yang meningkat seiring dengan meningkatnya kompetisi.

Membuka dan menambah jumlah tahun pendidikan berarti membuat seseorang menjadi produktif dan punya daya saing, sehingga bisa meningkatkan pendapatannya pelaku lebih produktif dan memberikan kontribusi nilai tambah (nilai tambah ekonomi) mereka kepada GDP. Sehingga program pro Pendidikan semakin besar, semakin besar daya tariknya terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini bisa dijelaskan oleh Hukum Coulomb, tentang daya tarik atau penolakan. Dua benda yang memiliki muatan serupa akan saling tolak satu sama lain saat mendekati satu sama lain. Kedua

benda dengan muatan berbeda (tidak sejenis) akan saling tarik menarik saat dibawa mendekat satu sama lain. Tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik adalah sebuah bentuk kekuatan yang dikenal sebagai gaya coulomb. Kekuatan coulomb adalah kekuatan yang timbul antara benda bermuatan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu proporsi muatan masing-masing badan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara objek bermuatan

Mencermati permasalahan biaya pendidikan, maka dana pendidikan baik dalam APBN dan APBD harus ditingkatkan sebagaimana dipesankan dalam Pasal 31 UUD1945 dan pasal 49 UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yaitu anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Oleh karenanya pemerintah harus konsisten dengan amanat konstitusi tersebut. Salah satunya Meningkatkan akses pendidikan atau Inklusi Pendidikan.

Daftar Pustaka

- Bils, Mark, and Peter J. Klenow. 2000. 'Does Schooling Cause Growth?' *American Economic Review*, vol. 90, no. 5 (December): 1,160–1,183
- Bassanini, Andrea, and Stefano Scarpetta. 2001. 'The Driving Forces of Economic Growth: Panel data evidence for the OECD countries'. *OECD Economic Studies*, no. 33 (II). Organisation for Economic Co-operation and Development
- Barro, Robert J., and Jong-Wha Lee. 2010. 'A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950–2010'. Working Paper, no. 15902. Cambridge, Mass.: National Bureau for Economic Research
- Crespo Cuaresma, Jesús, Wolfgang Lutz and Warren Sanderson. 2012. 'Age Structure, Education and Economic Growth'. Interim Report, no. IR-12-011. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (New York: Simon Schueter, 1996), p 68.
- Krueger, Alan B., and Mikael Lindahl. 2001. 'Education for Growth: Why and for whom?' *Journal of Economic Literature*, vol. 39, no. 4 (December): 1,101–1,136
- Lomborg, Bjørn, ed. 2013. *How Much Have Global Problems Cost the World? A scorecard from 1900 to 2050*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Patrinos, Harry Anthony, and George Psacharopoulos. 2013. 'Education: The income and equity loss of not having a faster rate of human capital accumulation'. In *How Much Have Global Problems Cost the World? A scorecard from 1900 to 2050*, edited by Bjørn Lomborg. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Swasono, Sri-Edi. *Ekspose Ekonomika, Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Revised and Extended Edition, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM edisibaru(2010), 43-49.
- Taimur Baig dan Ilan Goldfajn, "The Russian Default and the Contagion to Brazil," *IMF Working Paper* WP /00/160, (2000): 4-11.

/Aprilliantoni

Tilaar, HAR, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional